



## **Analisis Pelaksanaan Kebijakan Pembinaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Terhadap Kinerja Bisnis Dalam Mewujudkan Efektivitas Kelangsungan Usaha di Kabupaten Garut**

Irwan Sutiawan, Mulyaningsih

Program Studi Magister Administrasi Publik - Universitas Garut

### **Abstrak**

Tujuan penulisan penelitian ini yaitu membahas pengaruh pelaksanaan kebijakan pembinaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) terhadap kinerja bisnis dalam mewujudkan efektivitas kelangsungan usaha di Kabupaten Garut. Metoda penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksplanasi dengan pendekatan teknik evaluasi, teknik analisis yang digunakan dalam pembahasan dengan teknik analisis *causal effectual* yang mengkaji dan menganalisis hubungan rasional sebab akibat antara pelaksanaan kebijakan pembinaan UMKM, kinerja bisnis dan efektivitas kelangsungan usaha. Fokus penelitian adalah pemilik UMKM yang tergabung dalam Asosiasi atau Himpunan UMKM di wilayah Kabupaten Garut menggunakan sampling proporsional dengan teknik Slovin diperoleh jumlah sampel atau responden sebanyak 96 orang. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan pembinaan UMKM berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap kinerja bisnis dan efektivitas kelangsungan usaha. Kesimpulan penelitian ini bahwa efektivitas kelangsungan usaha dapat terwujud apabila kinerja bisnis dilaksanakan secara optimal yang didukung oleh pelaksanaan kebijakan pembinaan UMKM dengan baik dan berkelanjutan.

Kata kunci: Pelaksanaan Kebijakan, Kinerja Bisnis, Efektivitas Usaha, UMKM

### **1. Pendahuluan**

Dari perspektif dunia, diakui bahwa Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) memainkan suatu peran vital didalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, tidak hanya di negara-negara sedang berkembang tetapi juga di negara-negara maju (Yantos, 2016). Salah satu upaya strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memperkuat dasar kehidupan perekonomian dari sebagian terbesar rakyat Indonesia melalui pemberdayaan UMKM. Usaha UMKM sering disebut sebagai salah satu pilar kekuatan perekonomian suatu daerah (Layaman & Nurlatifah, 2016). Sektor ini terbukti dapat memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap PDB dan penyerapan tenaga kerja (Sultan, 2015).

Mengingat besarnya potensi UMKM dengan kegiatan usaha yang mencakup hampir semua lapangan usaha, serta tersebar di seluruh tanah air. Pemberdayaan UMKM akan mendukung peningkatan produktivitas ekonomi pemerintah daerah, penyediaan lapangan kerja yang lebih luas, dan peningkatan pendapatan bagi masyarakat. Pemberdayaan UMKM sebagai kegiatan ekonomi secara makro diarahkan agar semakin mampu menjadi wadah ekonomi yang handal untuk dapat bersaing dan berkiprah mengisi pembangunan perekonomian.

Sejalan dengan Undang-Undang No 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah merupakan salah satu potensi bagi kontribusi perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu

melalui pajak dan retribusi yang berkenaan dengan hasil produksi, dimana dengan segala kekuatan dan peluang yang dimiliki UMKM menjadi prospek usaha yang menjanjikan.

Kabupaten Garut memiliki 7 (tujuh) komoditas unggulan yaitu; 1) penyamakan kulit, 2) kerajinan kulit, 3) dodol garut, 4) kain sutera alam, 5) anyaman bambu, 6) minyak akar wangi, dan 7) batik garutan, yang saat ini dikembangkan melalui UMKM. Produk unggulan daerah merupakan salah satu penentu penguatan daya saing daerah (Octavia et al., 2017). Oleh karena itu diperlukan pengelolaan yang baik. Namun kenyataannya efektivitas kelangsungan usaha pada ketujuh komoditas unggulan tersebut sulit untuk diketahui keberadaannya karena tidak semua UMKM tersebut menjadi perusahaan formal yang terdaftar pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral (Disperindag dan ESDM) Kabupaten Garut, sebanyak 9.070 unit UMKM yang mendaftarkan sebagai perusahaan formal pada tahun 2015 dari sekitar 12.433 unit UMKM. Artinya bahwa sekitar 72,95% yang efektivitas kelangsungan usahanya secara formal dapat diketahui oleh Disperindag dan ESDM Kabupaten Garut. Melihat kondisi seperti diuraikan diatas maka semakin jelas dugaan relatif rendahnya efektivitas kelangsungan usaha UMKM di Kabupaten Garut.

Permasalahan lainnya yang dihadapi oleh UMKM adalah relatif rendahnya kinerja bisnis UMKM yang dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal antara lain; (1) belum tuntasnya penanganan aspek legalitas badan usaha dan kelancaran prosedur perijinan, pelaksanaan persaingan usaha yang sehat, penataan lokasi usaha dan pelaksanaan otonomi daerah, khususnya kemajuan daerah melaksanakan pemberdayaan koperasi dan UMKM; (2) pemulihan kondisi perekonomian makro akibat kenaikan BBM dan energi lainnya sangat berpengaruh terhadap produksi UMKM; (3) terbatasnya penyediaan produk jasa lembaga keuangan, khususnya kredit investasi; (4) terbatasnya ketersediaan dan kualitas jasa pengembangan usaha bagi UKM; dan (5) keterbatasan sumberdaya finansial untuk usaha mikro (Disperindag dan ESDM Kab. Garut, 2017). Permasalahan kinerja bisnis UMKM tentunya berdampak pada produktivitas perusahaan secara umum, dimana keberadaan UMKM di Kabupaten Garut mempunyai *multiplier-effect* yang dapat membantu pembangunan daerah dan pemanfaatan sumber daya lokal, serta dapat meningkatkan pendapatan sumber daya manusia yang terlibat didalamnya.

Dalam pemberdayaan ekonomi sejalan dengan potensi yang dimiliki oleh UMKM di Kabupaten Garut, maka Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral melakukan kegiatan pembinaan agar UMKM di Kabupaten Garut memiliki kualitas dan kinerja yang baik sehingga berdampak pada produktivitas UMKM serta dukungan bagi terwujudnya peningkatan efektivitas kelangsungan usaha khususnya di Kabupaten Garut. Sebagai ujung tombak perekonomian negara, sangat penting bagi UMKM untuk meningkatkan efektivitas usahanya (Bismala, 2016).

Namun pada kenyataannya pelaksanaan kebijakan pembinaan UMKM terdapat tumpang tindih dengan kebijakan yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, UMKM dan BMT Kabupaten Garut, sehingga terkesan diantara kedua lembaga tersebut tidak terdapat koordinasi dalam pembinaan UMKM. Di satu pihak bahwa Dinas Koperasi, UMKM dan BMT merupakan organisasi yang menaungi kegiatan UMKM namun disisi lain unuk keperluan ijin usaha berada pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral. Selain itu partisipasi UMKM untuk mengikuti program pembinaan cenderung rendah yang ditunjukkan salah satunya adalah masih minimnya jumlah unit UMKM yang hadir, sehingga terkesan hanya UMKM tertentu yang diundang atau menghadiri kegiatan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan pembinaan UMKM di Kabupaten Garut masih terkendala dengan berbagai hambatan.

Berdasarkan uraian fenomena masalah yang telah diuraikan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan kajian dan meneliti lebih mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas kelangsungan usaha sebagaimana yang terungkap pada fenomena permasalahan tersebut melalui penelitian.

## 2. Metodologi

Metode penelitian yang digunakan adalah metode eksplanasi, merupakan metode untuk mencari keterangan atau penjelasan dengan tujuan menjelaskan hubungan sebab akibat (kausalitas) antara dua variabel atau lebih berdasarkan pengamatan terhadap akibat yang ada dan berusaha untuk mengetahui variabel penyebabnya (Iskandar, 2017), sehingga penelitian ini disebut penelitian sebab akibat (*causal effectual*). Dalam pelaksanaannya maka penelitian ini dilakukan dengan teknik evaluasi yang bertujuan untuk memperoleh gambaran secara sistematis, akurat dan faktual tentang fakta, sifat pengaruh atau sebab akibat (*causal effectual*) serta hubungan antara fenomena yang diteliti (Iskandar, 2017).

Untuk melihat kondisi objektif pada objek penelitian, peneliti menetapkan operasionalisasi variabel penelitian yang disusun untuk memudahkan langkah-langkah dalam menjaring dan mengumpulkan data yang diperoleh dari responden sesuai dengan teori-teori, konsep-konsep, proposisi-proposisi dan asumsi-asumsi dari variabel-variabel penelitian yang ditetapkan. Adapun operasionalisasi variabel penelitian disajikan pada berikut:

**Tabel 1. Operasionalisasi Variabel Penelitian**

Variabel	Dimensi
Variabel X Pelaksanaan Kebijakan Pembinaan UMKM (Ramdhani & Ramdhani, 2017)	1. Konsistensi 2. Transparansi 3. Akuntabilitas 4. Keadilan 5. Partisipatif
Variabel Y Kinerja Bisnis UMKM (Goyal & Kazmi, 2013)	1. Tata Kelola Desain Produk 2. Tata Kelola Keuangan 3. Tata Kelola Pelanggan 4. Tata Kelola Teknologi dan Proses Produksi 5. Tata Kelola Pertumbuhan dan Pembelajaran 6. Tata Kelola Pemasaran
Variabel Z Efektivitas Kelangsungan Usaha (Steers, 1980)	1. Produktivitas dan Efisiensi 2. Laba dan Pengembangan Usaha 3. Stabilitas usaha 4. Semangat dan Kepuasan Kerja

Berdasarkan substansi pokok penelitian yang dilakukan, sasaran populasi (*population target*) dari penelitian ini adalah para pemilik UMKM yang telah tergabung pada Asosiasi atau Himpunan UMKM di wilayah Kabupaten Garut dengan jumlah responden sebanyak 96 orang. Pembahasan dilakukan atas pola pelaksanaan kebijakan pembinaan dan kinerja bisnis sebagai upaya mewujudkan efektivitas kelangsungan usaha.

### 3. Hasil dan Pembahasan

Pelaksanaan kebijakan pembinaan UMKM belum maksimal yang ditunjukkan masih terdapat tumpang tindih pelaksanaan kebijakan dan peran aktif UMKM masih rendah untuk mengikuti program pembinaan yang dilaksanakan oleh diinas-dinas terkait tersebut. Berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi kedua Dinas tersebut terdapat beberapa persamaan kebijakan-kebijakan yang diwujudkan menjadi program-program pembinaan, pelatihan dan pendidikan kepada UMKM, sehingga dalam pelaksanaan kebijakan tersebut dilakukan oleh masing-masing Dinas. Tentunya diperlukan koordinasi antara kedua Dinas tersebut agar pelaksanaan kebijakan pembinaan UMKM dapat lebih terfokus dan efektif dalam pelaksanaannya. Namun demikian dengan banyaknya program-program pembinaan, pelatihan dan pendidikan tersebut tidak sebanding dengan partisipasi UMKM untuk berperan aktif mengikuti program-program tersebut, antara lain dikarenakan tumpang tindihnya kebijakan pembinaan UMKM sehingga harus memilih salah satu Dinas yang melaksanakan, dan masih rendahnya motivasi pelaku atau pemilik UMKM untuk menghadiri program-program tersebut.

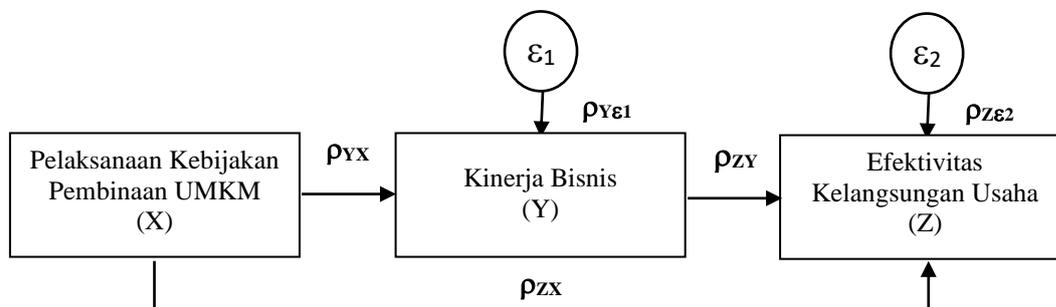
Kinerja bisnis UMKM belum optimal, hal ini ditunjukkan oleh tingkat perkembangan UMKM relatif rendah dan manajerial pengelolaan usaha masih tradisional dan bersifat turun temurun. Secara umum manajerial pengelolaan UMKM di Kabupaten Garut masih bersifat tradisional dan turun menurun dikarenakan usaha yang dijalankannya merupakan usaha keluarga dan dikelola oleh keluarga, artinya kemampuan manajerial berdasarkan pengalaman dan bergantian secara turun temurun. Tentunya kondisi tersebut akan berpengaruh terhadap tingkat perkembangan UMKM. Disinilah peran pemangku dan pelaku kebijakan untuk berkontribusi membantu para pelaku atau pemilik UMKM untuk dapat meningkatkan kemampuan manajerial usaha melalui program-program pelatihan dan pendidikan

Efektivitas kelangsungan usaha belum efektif hal ini ditunjukkan dengan faktor pertumbuhan UMKM relatif rendah, faktor penyerapan tenaga kerja (SDM) UMKM masih rendah, faktor produktivitas kerja relatif rendah, dan letak keberadaannya tidak diketahui karena tidak semua UMKM tersebut menjadi perusahaan formal.

Fenomena masih rendahnya faktor produktivitas UMKM tersebut secara keseluruhan tidak dapat dipisahkan dari kualitas dan kompetensi SDM. Secara umum UMKM masih menghadapi rendahnya kualitas SDM, seperti kurang terampilnya SDM dan kurangnya jiwa kewirausahaan, rendahnya penguasaan teknologi dan manajemen serta informasi pasar. Kemampuan UMKM untuk berkembang saat ini belum merata, terutama karena terbatasnya jumlah dan kualitas SDM yang tersedia. Berkaitan dengan kompetensi sumber daya manusia tidak terlepas dari latar belakang pendidikannya, hal tersebut mempunyai korelasi dimana tingkat pendidikan dapat membedakan kompetensi sumber daya manusia, hal ini dapat dilihat dilapangan dimana banyak SDM yang terlibat dalam UMKM memiliki tingkat pendidikan tamatan SD, SMP dan SMA.

Selain itu, letak keberadaannya tidak diketahui karena tidak semua UMKM tersebut menjadi perusahaan formal, kondisi ini berkaitan belum tuntasnya penanganan aspek legalitas badan usaha dan kelancaran prosedur perijinan, pelaksanaan persaingan usaha yang sehat, penataan lokasi usaha dan pelaksanaan otonomi daerah melaksanakan pemberdayaan UMKM.

Penelitian ini menguji fakta empiris tentang pengaruh pelaksanaan kebijakan pembinaan UMKM terhadap kinerja bisnis dalam mewujudkan efektivitas kelangsungan usaha. Paradigma penelitian yang dianalisis disajikan pada gambar berikut:



Gambar 1. Model Paradigma Penelitian

Hasil penelitian menyajikan penghitungan statistika yang dapat diwakili dalam bentuk tabel sebagaimana tersaji pada tabel berikut:

**Tabel 2. Hasil Penghitungan Analisis Statistika**

Hipotesis Utama	Koefisien Jalur	F <sub>hitung</sub>	F <sub>tabel</sub>	Determinan	Makna Hubungan
Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Pembinaan UMKM Terhadap Kinerja Bisnis Dalam Mewujudkan Efektivitas Kelangsungan Usaha	0,4971	10,0647	2,7036	0,2471	Signifikan
Sub Hipotesis	Koefisien Jalur	t <sub>hitung</sub>	t <sub>tabel</sub>	Determinan	Makna Hubungan
Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Pembinaan UMKM Terhadap Kinerja Bisnis	0,5066	5,6968	1,9861	0,2566	Signifikan
Pengaruh Kinerja Bisnis Terhadap Efektivitas Kelangsungan Usaha	0,3140	3,1088	1,9861	0,1396	Signifikan
Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Pembinaan UMKM Terhadap Efektivitas Kelangsungan Usaha	0,2579	2,4575	1,9861	0,1075	Signifikan

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana tersaji pada Tabel 2., maka diperoleh hasil penelitian bahwa secara simultan maupun parsial pelaksanaan kebijakan pembinaan UMKM berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kinerja bisnis dalam mewujudkan efektivitas kelangsungan usaha.

### **Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Pembinaan UMKM Terhadap Kinerja Bisnis Dalam Mewujudkan Efektivitas Kelangsungan Usaha**

Hasil pengujian diperoleh keputusan  $H_0$  ditolak, artinya variabel Pelaksanaan Kebijakan Pembinaan UMKM berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Bisnis dalam mewujudkan Efektivitas Kelangsungan Usaha. Besarnya pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Pembinaan UMKM terhadap Kinerja Bisnis dalam mewujudkan Efektivitas Kelangsungan Usaha sebesar 24,71%,

sedangkan sisanya sebesar 75,29% (epsilon) dipengaruhi oleh variabel lain di luar variabel Pelaksanaan Kebijakan Pembinaan UMKM yang tidak dimasukkan ke dalam model penelitian.

Hasil pengujian ini menguatkan dugaan bahwa konsistensi, transparansi, akuntabilitas, keadilan dan partisipatif dapat menentukan kinerja bisnis yang pada akhirnya dapat mewujudkan efektivitas kelangsungan usaha.

Dari hasil pengamatan di lapangan, diketahui bahwa konsistensi kebijakan dalam hal ini adalah Kebijakan Pembinaan UMKM yang sesuai prosedur dan aturan/norma akan mudah dilaksanakan oleh para pelaksana kebijakan, yaitu pemilik UMKM yang berada di wilayah Kabupaten Garut. Di samping itu, transparansi juga menentukan kualitas informasi dalam kebijakan tersebut, dimana informasi yang terdapat dalam kebijakan pembinaan UMKM harus terbuka, mudah dimengerti dan dapat diakses oleh umum sehingga informasi kebijakan pembinaan tersebut dapat sampai dengan jelas.

Selanjutnya, kebijakan yang memiliki akuntabilitas yang baik, memiliki dasar keadilan dalam pelaksanaannya, serta melibatkan partisipasi masyarakat dalam hal ini UMKM untuk berperan serta dalam proses pelaksanaan kebijakan pembinaan UMKM sehingga sasaran dan tujuannya dapat tercapai. Dengan pelaksanaan kebijakan pembinaan UMKM yang baik akan berimbas pada efektivitas kelangsungan usaha menjadi lebih baik. Walaupun demikian, berdasarkan hasil wawancara, masih terdapat UMKM yang belum berpartisipasi dalam kegiatan pembinaan tersebut dikarenakan belum terdaftar pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Garut. Namun demikian, segenap jajaran Disperindag dan ESDM Kabupaten Garut tetap konsisten dalam melaksanakan kebijakan pemerintah berupa Kebijakan Pembinaan UMKM yang sejatinya bertujuan untuk meningkatkan Kinerja Bisnis dalam Mewujudkan Efektivitas Kelangsungan Usaha.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa Efektivitas Kelangsungan Usaha tidak hanya dipengaruhi oleh Pelaksanaan Kebijakan Pembinaan UMKM, namun juga dipengaruhi oleh Kinerja Bisnis dari UMKM tersebut. Dimana faktor tata kelola desain produk, tata kelola keuangan, tata kelola pelanggan, tata kelola teknologi dan proses produksi, tata kelola pertumbuhan dan perkembangan serta tata kelola pemasaran merupakan serangkaian cara pengelolaan usaha agar kinerja bisnisnya meningkat. Di dalam program Kebijakan Pembinaan UMKM, maka dinas-dinas terkait bekerjasama khususnya Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Garut yang sudah memberikan dukungan melalui program-program pembinaan UMKM dengan tujuan meningkatkan Kinerja Bisnis UMKM, yang mana hal ini akan berimbas pada Efektivitas Kelangsungan Usaha di Kabupaten Garut.

Selain Pelaksanaan Kebijakan Pembinaan UMKM dan Kinerja Bisnis, terdapat faktor-faktor lain yang mempengaruhi Efektivitas Kelangsungan Usaha. Berdasarkan hasil penelitian, besarnya pengaruh faktor lain di luar Pelaksanaan Kebijakan Pembinaan UMKM dan Kinerja Bisnis sebesar 75,29% (epsilon). Faktor lain yang diduga mempengaruhi Efektivitas Kelangsungan Usaha tersebut salah satunya adalah faktor modal perbankan. Faktor modal perbankan dimungkinkan memiliki peran dalam menggerakkan dan menjalankan operasional perusahaan sehingga dapat meningkatkan kualitas Efektivitas Kelangsungan Usaha sebagaimana yang terungkap melalui wawancara kepada responden.

### **Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Pembinaan UMKM Terhadap Kinerja Bisnis**

Berdasarkan hasil pengujian diperoleh keputusan  $H_0$  ditolak, sehingga variabel Pelaksanaan Kebijakan Pembinaan UMKM berpengaruh signifikan terhadap variabel Kinerja Bisnis. Adapun besar pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Pembinaan UMKM terhadap variabel Kinerja Bisnis adalah sebesar 25,66% sedangkan sisanya sebesar 74,34% (epsilon) dipengaruhi oleh variabel lain diluar variabel Pelaksanaan Kebijakan Pembinaan UMKM yang tidak dimasukkan ke dalam model penelitian .

Hasil pengujian tersebut menguatkan dugaan bahwa penggunaan dimensi konsistensi, transparansi, akuntabilitas, keadilan dan partisipatif dapat menentukan meningkatnya Kinerja Bisnis. Dari hasil observasi, diketahui bahwa konsistensi kebijakan yang diterima oleh responden akan memudahkan pemahaman terhadap transparansi informasi yang disampaikan dengan akuntabilitas informasi yang baik, sehingga berdampak terhadap proses peningkatan Kinerja Bisnis. Di samping itu, azas keadilan dan partisipatif yang diterapkan bagi semua UMKM juga menentukan kualitas Pelaksanaan Kebijakan Pembinaan UMKM menjadi lebih baik. Dengan demikian, kondisi ini menunjukkan bahwa Pelaksanaan Kebijakan Pembinaan UMKM dapat berpengaruh terhadap variabel Kinerja Bisnis. Artinya Pelaksanaan Kebijakan Pembinaan UMKM yang dilakukan oleh para pelaksana kebijakan semakin baik, maka akan semakin baik pula Kinerja Bisnis yang dilaksanakan oleh pemilik UMKM.

### **Pengaruh Kinerja Bisnis Terhadap Efektivitas Kelangsungan Usaha**

Berdasarkan hasil pengujian diperoleh keputusan  $H_0$  ditolak, sehingga variabel Kinerja Bisnis berpengaruh signifikan terhadap variabel Efektivitas Kelangsungan Usaha. Besar pengaruh variabel Kinerja Bisnis terhadap variabel Efektivitas Kelangsungan Usaha secara langsung adalah sebesar 13,96% sedangkan sisanya sebesar sebesar 86,04% (epsilon) dipengaruhi oleh variabel lain di luar variabel Kinerja Bisnis yang tidak dimasukkan ke dalam model penelitian.

Hasil pengujian di atas menguatkan dugaan bahwa penggunaan dimensi tata kelola desain produk, tata kelola keuangan, tata kelola keuangan, tata kelola pelanggan, tata kelola teknologi dan proses produksi, tata kelola pertumbuhan dan perkembangan serta tata kelola pemasaran menjadi faktor penguat dalam mewujudkan Efektivitas Kelangsungan Usaha di Kabupaten Garut. Dari hasil observasi, diketahui bahwa tata kelola desain produk didukung oleh tata kelola keuangan yang dilakukan oleh para pemilik UMKM dapat dikatakan telah cukup baik, hal ini dibuktikan dengan perencanaan produk yang akan diproduksi disesuaikan dengan selera konsumen atau pasar melalui tata kelola pelanggan. Di samping itu, tata kelola teknologi dan proses produksi dapat dikatakan sudah berjalan dengan baik dimana seluruh komponen produksi dapat bekerja dengan lancar untuk meningkatkan produktivitas. Selanjutnya, dari sisi tata kelola pertumbuhan dan pembelajaran serta tata kelola pemasaran, kedua aspek tersebut dapat dikatakan sudah berjalan dengan cukup optimal sehingga hal tersebut dapat mendukung meningkatnya kinerja Bisnis UMKM di Kabupaten Garut.

Dengan demikian kondisi ini menunjukkan bahwa Kinerja Bisnis memiliki pengaruh signifikan terhadap Efektivitas Kelangsungan Usaha, artinya apabila Kinerja Bisnis berjalan dengan optimal maka akan mendorong Efektivitas Kelangsungan Usaha akan menjadi optimal.

Namun di sisi lain, perusahaan memiliki kemampuan meningkatkan produktivitas dengan kondisi perusahaan saat ini belum optimal. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, pada umumnya membenarkan bahwa tidak semua pemilik UMKM memiliki kemampuan yang sama dalam

meningkatkan produktivitas perusahaannya, hal ini dipengaruhi beberapa faktor, salah satu diantaranya yaitu pengalaman menjalankan usaha setiap pemilik berbeda. Pemilik UMKM yang sudah berpengalaman memiliki kemampuan yang terbiasa dengan berbagai kondisi sehingga tahu apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan produktivitas. Selain itu dengan adanya pembinaan UMKM jelas sangat membantu mereka dalam hal manajerial perusahaan

### **Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Pembinaan UMKM Terhadap Efektivitas Kelangsungan Usaha**

Berdasarkan hasil pengujian diperoleh keputusan  $H_0$  ditolak, sehingga variabel Pelaksanaan Kebijakan Pembinaan UMKM berpengaruh signifikan terhadap variabel Efektivitas Kelangsungan Usaha. Berdasarkan hasil pengujian di atas diketahui bahwa Pelaksanaan Kebijakan Pembinaan UMKM berpengaruh signifikan terhadap Efektivitas Kelangsungan Usaha secara langsung sebesar sebesar 6,65%, sedangkan pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Pembinaan UMKM terhadap Efektivitas Kelangsungan Usaha melalui Kinerja Bisnis sebesar 4,10%. Sehingga, jumlah pengaruh langsung dan tidak langsung variabel Pelaksanaan Kebijakan Pembinaan UMKM terhadap Efektivitas Kelangsungan Usaha sebesar 0,1075 atau sebesar 10,75% sedangkan sisanya sebesar 0,8925 atau sebesar 89,25% (epsilon) dipengaruhi oleh variabel lain di luar variabel Pelaksanaan Kebijakan Pembinaan UMKM yang tidak dimasukkan ke dalam model penelitian.

Hasil pengujian di atas menguatkan dugaan bahwa penggunaan dimensi produktivitas dan efisiensi, laba dan pengembangan usaha, stabilitas usaha, serta semangat dan kepuasan kerja dapat menentukan peningkatan Efektivitas Kelangsungan Usaha.

Dari hasil pengamatan di lapangan, rendahnya pengaruh variabel Pelaksanaan Kebijakan Pembinaan UMKM terhadap Efektivitas Kelangsungan Usaha dapat disebabkan walaupun pelaksanaan kebijakan berupa program pembinaan telah dilaksanakan dengan baik, adanya komitmen yang kuat dari para pelaksana kebijakan untuk melaksanakan kebijakan dan pemilik UMKM menjalankan kinerja bisnis telah diupayakan maksimal, namun hal tersebut bukanlah faktor dominan yang berpengaruh terhadap efektivitas kelangsungan usaha.

Variabel lain (epsilon) yang diduga mempengaruhi Efektivitas Kelangsungan Usaha adalah modal perbankan. Faktor modal perbankan dimungkinkan memiliki peran dalam menggerakkan dan menjalankan operasional perusahaan sehingga dapat meningkatkan kualitas Efektivitas Kelangsungan Usaha sebagaimana yang terungkap melalui wawancara kepada responden.

## **4. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan di atas maka peneliti dapat menyimpulkan terdapat pengaruh yang positif dan signifikan dari pelaksanaan kebijakan pembinaan UMKM terhadap kinerja bisnis dalam mewujudkan efektivitas kelangsungan usaha di Kabupaten Garut.

## Daftar Pustaka

- Bismala, L. (2016). Model Manajemen Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk Meningkatkan Efektivitas Usaha Kecil Menengah. *Jurnal Enterpreuner Dan Entrepreneurship*, 5(1), 19–25.
- Goyal, P., & Kazmi, Z. R. A. . (2013). Corporate Sustainability Performance and Firm Performance Research: Literature Review and Future Research Agenda. *Management Decision. Emerald Group Publishing Limited*, 51(2), 361–379.
- Iskandar, J. (2017). *Metodologi Penelitian Administrasi*. PUSPAGA.
- Layaman, & Nurlatifah. (2016). Strategi Meningkatkan Produksi UMKM di Kabupaten Cirebon Melalui Efektivitas Persediaan Bahan Baku dan Modal Usaha. *Jurnal AL-Mustashfa*, 4(2), 111–123.
- Maramis, J. B. (2016). Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), UMKM dan Kebijakan Pemerintah. *Jurnal Riset Bisnis Dan Manajemen*, 4(4), 385–405.
- Octavia, A., Zulfarnetti, & Erida. (2017). Meningkatkan Daya Saing Daerah Melalui Peningkatan Kinerja Bisnis Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Provinsi Jambi. *Perspektif Pembiayaan Dan Pembangunan*, 4(3), 155–166. <http://journals.ums.ac.id/index.php/benefit/article/view/4172>
- Puryono, D. A., & Kurniawan, S. Y. (2017). Pengukuran Tingkat Efektivitas Kinerja UMKM Batik Bakaran Secara Berkelanjutan Menggunakan Model Green SCOR. *Jurnal Informatika Upgris*, 3(1), 16–23. <https://doi.org/10.26877/jiu.v3i1.1604>
- Ramdhani, A., & Ramdhani, M. A. (2017). Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. *Jurnal Publik*, 11(1), 1–12. <https://doi.org/10.1109/ICMENS.2005.96>
- Satrio, D. (2017). Analisa kinerja bisnis pada perusahaan keluarga (family bussiness) oriental cap Nyonya Pekalongan. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 20(7), 16–20.
- Steers, R. (1980). *Efektivitas Organisasi*. Erlangga.
- Sultan. (2015). Pengaruh Kompetensi Wirausaha Terhadap Strategi, Kinerja Bisnis Dan Daya Saing Usaha Kecil Di Sulawesi Selatan. *Jurnal Bisnis Dan Kewirausahaan*, 4(4), 423–436.
- Sunanto. (2016). Efektivitas Penerimaan Pajak Umkm Berdasarkan Pp No. 46 Tahun 2013 Dan Kontribusi Terhadap Penerimaan. *Jurnal Online Insan Akuntan*, 1(2), 319–340.
- Sutikno, A. S. P. ., & Wurjaningrum, F. (2015). Kriteria Terhadap Kinerja Bisnis Pada Rumah Sakit Islam Jemursari. *Jurnal Manajemen Teori Dan Terapan*, 8(1).
- Yantos. (2016). Kebijakan Pemerintah Kabupaten Kampar Terhadap Peningkatan Daya Saing Umkm Desa Koto Mesjid Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (Mea). *Jurnal Risalah*, 27(1), 68. <https://doi.org/10.1002/Cbm>
- Yuliawati, T., Rani, A. M., & Assyofa, A. R. (2017). Efektivitas Implementasi Green Financing Sebagai Alternatif Pembiayaan Berkelanjutan Bagi UMKM Sektor Industri Pengolahan Alas Kaki Di Kota Bandung. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis (Performa)*, XIV(2), 152–162.